BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Kerja Praktek

Keuangan Negara dan pembangunan Nasional tidak dapat dipisahkan dari keuangan daerah dan pembangunan daerah, bahkan dapat dikatakan pembangunan nasional identik dengan pembanguan daerah, karena pembangunan itu sendiri pada dasarnya dilaksanakan di daerah. Oleh karena itu perlu dilaksanakan penyerahan serta pengolahan dan pembangunan secara efektif dan efisien. Sejalan dengan pengolahan keuangan Negara, berbagai kebijakan yang telah ditempuh selalu diarahkan agar pembangunan di daerah dapat lebih meningkatkan pertumbuhan ekomoni daerah dan sekaligus meningkatkan perekomian Nasional. Tujuan pembangunan Nasional Bangsa indonesia adalah untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan merata baik secara material maupun spiritual. Untuk mewujudkan suatu pembangunan yang dicita - citakan, diperlukan sarana dan prasarana yang dapat berupa sumber daya manusia, pengetahuan dan teknologi, situasi politik yang mendukung dan dana yang memadai. Dalam rangka memenuhi kebutuhan dana yang memadai guna pembangunan nasional, pemerintah mempunyai sumber - sumber penerimaan yang berasal dari luar negeri dan dalam negeri. Salah satu contoh penerimaan pemerintah yang berasal dari dalam negeri yang sangat penting dan potensi sekali untuk membiayai pembangunan Nasional adalah sektor Pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikullir ke sektor pemerintah)

berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (Rochmad Soemitro, 1991 , dalam Siti Kurnia Rahayu 2012: 22). Pajak daerah adalah Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, dibedakan dengan pajak Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Tingkat II (Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati 2010 :13). Pajak merupakan altenatif yang sangat potensial, sebagai satu sumber penerimaan Negara yang sangat potensial, sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat selain karena jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Dimana Pajak Daerah terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten / Kota. Dimana Pajak Kabupaten dan Kota terdiri dari :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Pengerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C
8. Pajak Sarang Burung Walet
9. Pajak Parkir
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak Daerah menurut Prof. Dr. Rahardjo Adisasmita, M. Ec (2009:72) dalam bukunya Pembiayaan Pembangunan Daerah, mengemukakan bahwa Pajak Daerah yaitu kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan sebagaian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum.

Salah satu sumber dana berupa pajak yang dimaksud adalah pajak hotel dan restoran. Pajak hotel dan restoran dapat dimanfaatkan untuk fungsi penentuan kebijakan yang terkait dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerimaan pajak hotel dan restoran memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak yang begitu besar, dan pajak hotel dan restoran merupakan sumber penerimaan yang potensial bagi daerah, dari data Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah bahwa terdapat 16 Hotel dan 74 Restoran yang sudah terdaftar di Karawang. Pajak hotel dan restoran merupakan pajak daerah karena dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Dan semakin meningkatnya jumlah hotel dan restoran di Kabupaten Karawang, maka memungkinkan dilakukan pemungutan pajak hotel dan restoran oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.

Pada prinsipnya sistem perpajakan di Indonesia menggunakan sistem *Self Assement*, dalam sistem ini wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri. Namun mengingat besarnya jumlah objek pajak dan beragamnya tingkat pendidikan dan pengetahuan wajib pajak, terutama dipedesaan maka belum sepenuhnya wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban untuk mendaftarkan dan melaporkan objek pajaknya

dengan baik. Oleh karena itu untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, dilakukan pendataan terhadap objek dan subjek pajak hotel dan pajak restoran.

Menurut Penjelasan Undang - Undang Nomor 28 tahun 2009 adalah: Pengertian Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran sedangkan pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Dan Pengertian Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran.

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk menulis laporan Kerja Praktek ini dengan judul **"TINJAUAN ATAS PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN PADA KANTOR DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT".**

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Praktek

1.2.1 Maksud Kerja Praktek

Adapun maksud dari kerja praktek ini adalah untuk belajar dan mengetahui serta memahami informasi tentang perpajakan dan prosedur

pemungutan Pajak Hotel dan Restoran pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Karawang.

1.2.2 Tujuan Kerja Praktek

Adapun Tujuan dari adanya mata kuliah Kerja Praktek dan pelaksanaannya secara langsung adalah untuk melatih mahasiswa peka terhadap lingkungan kerja yang akan mereka alami, sesuai dengan profesinya sehingga dapat menjadi sumber daya manusia yang benar - benar siap menghadapi persaingan bebas pada dunia kerja. Adapun tujuan lain dari Kerja Pratek bagi Mahasiswa :

1. Untuk mengetahui prosedur pemungutan Pajak Hotel dan Restoran pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kab. Karawang.
2. Untuk mengetahui dokumen-dokumen Pajak Hotel dan Restoran pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah di Kab. Karawang.
3. Untuk mengetahui hambatan - hambatan dan upaya - upaya yang harus dihadapi oleh Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Asset Daerah di Kab. Karawang.

1.3 Kegunaan Kerja Praktek

Dalam melakukan kerja praktek penulis mengharapkan manfaat dan pengalaman, walaupun dilaksanakan dengan kemampuan penulis yang terbatas sehingga penyajian laporan kuliah kerja praktek ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kegunaan kuliah kerja praktek bisa bermanfaat bagi :

1. ***Bagi Instansi***

   Sebagai masukan dan bahan untuk mengevaluasi prosedur pemungutan pajak hotel dan restoran pada Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang..

2. ***Bagi Penulis***

   a. Menjadikan sarana untuk menambah kemampuan analisis dan wawasan tentang pengetahuan tentang pajak daerah di indonesia.
   b. Memperoleh perbandingan antara teori - teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan kenyataan yang terjadi saat dilapangan.

3. ***Bagi Pihak Lainnya***

   Hasil Laporan Kerja Praktek ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi atau bahan acuan untuk menambah pengetahuan di bidang perpajakan daerah dan juga memberikan referensi baru dalam laporan kuliah kerja praktek bila ada peneliti lain mengambil judul yang sama dan agar disempurnakan kembali bila ada yang kurang sesuai dengan judul yang penulis buat.

1.4 Metode Kerja Praktek

Metode yang digunakan oleh penulis dalam menyusun laporan kuliah kerja praktek ini adalah *semi block release* yaitu metode pelaksanaan kuliah kerja praktek yang dilakukan sewaktu - waktu berdasarkan jam kerja yang ditetapkan sebelumnya.

1. ***Studi Lapangan***

   Dengan mengadakan penelitian langsung ke perusahaan dimana penulis mengadakan kuliah kerja praktek beberapa bentuk studi lapangan diantaranya adalah sebagai berikut :

   a. ***Observasi***

      Teknik Pengumpulan data dengan cara terjun langsung pada kegiatan atau pekerjaan yang dihadapi melalui pengamatan dan pencatatan sehingga diperoleh kebenaran dan keakuratan data.

   b. ***Wawancara***

      Teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan komunikasi langsung dengan subjek untuk pengambilan data dalam staff pelaksanaan yang menguasai bidangnya.

   c. ***Dokumentasi***

      Pengumpulan data dengan menggunakan bahan tertulis dengan cara mempelajari dan membaca pendapat ahli yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas guna memperoleh gambaran untuk menunjang penyusunan dan pembahasan.

2. ***Jenis data***

Adapun jenis data yang dikumpulkan adalah sebagai sebagai berikut :

a. Data Primer

Yaitu data yang dikumpulkan penelitian secara langsung melalui objek penelitian dengan melakukan wawancara dengan staff dan pegawai Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Karawang dan pengamatan secara langsung aktivitas di tempak Kerja Praktek (KP)

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dengan jalan mempelajari dan membaca yang ada kaitannya dengan bidang yang ditulis dan artikel dari internet.

1.5 Lokasi dan Waktu Kerja Praktek

Dalam melaksanakan kuliah kerja praktek penulis memilih Kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Karawang adapun rincian dari lokasi dan waktu kuliah kerja praktek yaitu :

A. Lokasi Kegiatan Kerja Praktek

Penulis melaksanakan kuliah kerja praktek di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Karawang yang beralamat di Jalan Siliwangi No. 2 Telp. (0267) 8450978, FAX (0267) 8450978 Karawang.

B. Waktu Kegiatan Kerja Praktek

Waktu kerja praktek dilaksanakan selama 1 bulan mulai tanggal 15 Juli 2013 sampai dengan 30 Agustus 2013. Pelaksanaan kerja praktek ini dilakukan setiap hari kerja (kecuali hari Sabtu dan Minggu) dimulai pada pukul 08.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB.

Tabel 1.1

Aktivitas Kuliah Kerja Praktek

No	Hari	Waktu	Keterangan
1	Senin s/d Kamis	08.00 - 15.00 WIB	Aktivitas Kantor
		12.00 - 13.00 WIB	Istiharat
2	Jumat	08.00 - 15.00 WIB	Aktivitas Kantor
		11.00 - 13.00 WIB	Istiharat
3	Sabtu dan minggu	LIBUR	

Tabel 1.2

Jadwal Pelaksanan Kerja Praktek

Tahap	No	Bulan	Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember				Januari			
		Kegiatan / minggu ke-	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Pendahuluan	1	Memperoleh surat ijin Kerja Praktek dari kampus			■																													
	2	mencari tempat untuk melaksanakan Kerja Praktek				■	■	■																										
	3	Mengajukan surat permohonan Kerja Praktek ke perusahaan						■																										
	4	Menentukan tempat Kerja Praktek						■																										
	5	Meminta surat pengantar kepada Kantor Wilayah						■																										
Pelaksanaan	1	Melaksanakan Kerja Paktek							■	■	■	■	■	■	■																			
	2	Pengambilan dan pengumpulan data dari perusahaan															■	■																
	3	Menyiapkan laporan Kerja Praktek																■	■															
Pelaporan	1	Penyusunan laporan Kerja Praktek																		■	■	■	■											
	2	Bimbingan di kampus																						■	■	■	■	■	■	■	■	■		
	3	Penyempurnaan laporan Kerja Praktek																															■	